

# Bangkitnya Neokonservatif AS

Oleh LEONARD HUTABARAT

Dalam pidato tahunan tanggal 2 Februari lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush menegaskan kembali "freedom" sebagai "the core of American values" dalam mewujudkan perdamaian dunia dan sekaligus mendasari tiap kebijakan politik luar negerinya. Dari pidato kenegaraan tersebut tampak dua hal yaitu pertama, terdapat keyakinan bahwa AS memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan yisi kebebasan individualnya ke seluruh dunia. Kedua, adalah tugas pemerintah federal AS untuk melindungi warganya dari ancaman eksternal.

Apapun dasar tindakan Pemerintah AS, kedua prinsip ini membentuk bagaimana dan bilamana AS menjadi terlibat dalam urusan luar negerinya dengan negara-negara lain.

Prinsip pertama dilatarbelakangi pemikiran Woodrow Wilson dan juga telah berakar sejak abad ke-18. Dasar moralitas ini menjadi bagian dari pemikiran politik sejak berdirinya AS. Kebebasan individu adalah suatu *moral absolute* dan Pemerintah AS menjamin kebebasan tersebut. Sementara itu, prinsip kedua akan menentukan dorongan intervensi AS dalam

urusan luar negeri.

Konsepsi *American exceptionalism* dengan *messianic ethos*-nya telah mendorong intervensi global AS atas nama "individual liberty" dan "freedom". Henry Kissinger menyebut ini sebagai "a balance between isolationism and globalism". Atau Walter Mead (2001) melihatnya sebagai suatu tendensi *Wilsonian, Jeffersonian, Jacksonian* dan *Hamiltonian*.

## Neokonservatif AS

Di masa jabatan kedua (2005-2009) sebagai Presiden AS, George W. Bush berjanji untuk menggulingkan seluruh kekuasaan tirani. Ia juga berjanji menyebarluaskan kebebasan dan demokrasi hingga ke pelosok tergelap di dunia ini. Adalah kebijakan AS untuk terus mencari dan mendukung pertumbuhan gerakan dan institusi demokratis di semua bangsa dan budaya. Janji ini disampaikan dalam pidato pertama usai diambil sumpahnya sebagai Presiden di Capitol Hill, Washington, D.C. (20/1).

Pidato Presiden Bush yang menyebutkan kembali janjinya untuk mengakhiri tirani di seluruh dunia dan mengembangkan kebebasan di negara-negara yang mempraktikkan kekerasan disebutkan oleh banyak pihak akan meningkatkan peran-musuhan dan pertikaian di se-

tero dunia yang tidak sehaluan dengan konsepsi "American freedom" tersebut.

Presiden Bush tampaknya sangat terinspirasi dengan konsepsinya Natan Sharansky dalam *The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror*. Pemerintah AS dalam era Presiden Bush saat ini cenderung berkeyakinan bahwa penyebarluasan kebebasan merupakan bagian yang terpenting dari upaya melindungi AS.

Presiden Bush memiliki keyakinan akan adanya kekuatan transformatif dari keleluasan bertindak. Upaya AS guna mewujudkan "free societies" di Irak dan Afghanistan tidak jauh dari manifesto kebijakan luar negeri a la Sharansky - seorang politisi Israel yang ditahan 13 tahun dalam penjara Soviet *gulag* dan dibebaskan tahun 1986.

Sharansky menekankan kebebasan dan demokrasi adalah masa depan kemanusiaan, dan penyebarluasan kebebasan serta demokrasi adalah satu-satunya jalan untuk menjamin keamanan bagi tiap individu. Ia telah menjadi salah seorang tokoh favorit bagi kelompok neokonservatif AS di pemerintahan Bush saat ini.

Akankah upaya demokratisasi global dapat dilakukan Pemerintah AS melalui cara-cara

multilateralisme dan dapat diterima oleh banyak negara di dunia saat ini? Kelompok neokonservatif AS yang mendukung upaya demokratisasi secara global memberikan respons terhadap upaya menghadapi terorisme dengan menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia.

Presiden Bush menganggap visi kelompok neokonservatif untuk menata dunia kembali sangatlah praktis. Menurutnya, jika seseorang itu tidak percaya kepada kebebasan, suatu masyarakat yang bebas tidak akan pernah diwujudkan. Tampak Presiden Bush akan memfokuskan diri kepada strategi kebebasan untuk mewujudkan *free society* yang jauh dari *fear society* di seluruh dunia dengan menggunakan seluruh aset AS secara ofensif dan agresif.

Politik luar negeri AS ke depan yang merupakan kontinuitas dari kebijakan Bush yang agresif sebelumnya dikhawatirkan banyak negara akan meningkatkan ketegangan dunia. Dimana AS hanya akan menempuh pendekatan multilateral kepada sekutu-sekutunya, namun akan menerapkan cara-cara Amerika terhadap negara-negara bukan mitranya dalam menjalankan *manifest destiny*-nya.

Dalam konteks inilah dunia sangat menanti realisasi janji Menlu Condoleezza Rice dalam

dengar pendapat di hadapan Komite Senat untuk Urusan Luar Negeri bulan Januari lalu bahwa ia akan mengedepankan diplomasi dalam periode kedua pemerintahan Presiden Bush empat tahun ke depan, termasuk memulihkan hubungan Transatlantik AS-Eropa, dimana Eropa lebih mempercayai institusi-institusi, rezim dan norma-norma internasional dalam menyelesaikan banyak persoalan internasional saat ini.

Apabila AS akan mewujudkan *messianic ethos*-nya dengan merangkul sekutu-sekutunya atau tidak akan terlalu peduli jika harus bertindak sendirian, maka apa yang menurut Robert Kagan (2003) akan terjadi, dimana dunia ke depan akan masih menyaksikan bagaimana *power politics* yang dipengaruhi *neoconservatism* akan tampak dalam kebijakan polugri AS. Dunia tidak akan banyak melihat perubahan drastis dengan munculnya penekanan yang lebih terhadap multilateralisme dalam polugri AS, namun kontinuitas dari unilateralisme AS akan tetap mewarnai percaturan politik internasional.

Kebijakan realisme garis keras ini didasarkan pada gagasan Thucydides: *the strong do what they will, the weak what they must*.

Presiden Bush pada pelan-

tikan itu juga memperlihatkan kecenderungan kuat untuk mempertahankan gaya burung elang dalam politik global AS yang bersifat Hobbesian. Penekanan Presiden Bush yang akan mendorong kebebasan dan kemerdekaan melawan "penguasa-penguasa dari rezim-rezim yang tidak tahu aturan tampaknya masih memperlihatkan gaya dan sosok *American hawkish foreign policy* untuk periode kekuasaan empat tahun kedua.

Hal ini tidak terlepas dari rasa percaya diri Presiden Bush yang lebih tinggi dengan kemanggangannya dalam pemilihan presiden kedua bulan Nopember 2004 yang membuktikan bahwa mayoritas rakyat Amerika masih mendukung kebijakan pemerintahannya. Ancaman unilateralisme AS masih mencemaskan banyak negara, terutama yang merasa tidak mempunyai hubungan harmonis dengan negara adidaya satu-satunya ini. Selain itu, ekspansi demokrasi liberal juga tampaknya akan mewarnai berbagai kawasan di dunia dan kita akan menyaksikan harga yang harus dibayar atas nama demokrasi dunia.

Penulis adalah pemerhati masalah internasional, alumnus Institut d'Etudes Politiques (I.E.P.) de Paris